



IMPLIKASI NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH DENGAN ISRAEL TERHADAP PROSPEK KEMERDEKAAN PALESTINA: TELAAH KONSTRUKTIVISME

Minhajuddin^{1*}, Ahmad Khoirul Umam²

¹Program Studi Perdagangan Internasional; Universitas 'Aisyiyah Bandung; Indonesia

²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional; Universitas Paramadina; Indonesia

*email: minhajuddin@unisa-bandung.ac.id

Abstract

A series normalization of diplomatic ties between Middle Eastern countries with Israel took place in 2020. This normalization phenomenon drew attention as it occurred amidst the uncertain hope of Palestinian and Israel continued occupation on Palestinian territories. This study uses a constructivist perspective to analyze the process of normalization during the period of 2010-2020, by examining the intersubjective dynamics among various stakeholders, including the United States, Israel, Saudi Arabia, and the Middle Eastern countries involved in the normalization process. The findings of this research conclude that the diplomatic normalization between Middle Eastern countries and Israeli is not solely motivated by economic, political, and military factors, but rather by shared ideas agreed upon by the United States, Israel, and the Middle Eastern countries, which state that the Middle East region's threat originates from Iran. This threat perception serves as the rationale for the Middle Eastern countries and Israel to normalize relations in order to delegitimize Iran's hegemony in the region. The implications of this normalization further complicate the position of Palestine in its struggle for independence, as Israel's position grows stronger.

Keywords: *constructivism; Middle East; normalization; Palestine independence*

Abstrak

Serangkaian normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Timur Tengah dengan Israel terjadi di tahun 2020. Fenomena normalisasi ini menarik perhatian karena terjadi di tengah nasib bangsa Palestina yang masih belum jelas dan Israel masih terus menguasai wilayah Palestina. Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme dalam menganalisis proses terjadinya normalisasi periode 2010-2020 dengan mengamati intersubjektif antara beberapa pihak yang berkepentingan antara lain Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, dan negara Timur Tengah yang terlibat dalam proses normalisasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Timur Tengah dengan Israel bukan hanya murni karena faktor ekonomi, politik, dan militer namun ide yang disepakati bersama antara pihak Amerika Serikat, Israel dan negara-negara Timur Tengah yang menyatakan bahwa ancaman kawasan Timur Tengah berasal dari Iran. Persepsi ancaman yang diyakini bersama, menjadi alasan negara-negara Timur Tengah dan Israel melakukan normalisasi untuk mendelegitimasi pengaruh Iran di kawasan. Implikasi normalisasi tersebut semakin mempersulit posisi Palestina dalam hal memperjuangkan kemerdekaannya karena posisi Israel yang semakin kuat.

Kata Kunci: kemerdekaan Palestina; konstruktivisme; normalisasi; Timur Tengah

Pendahuluan

Dalam kajian hubungan internasional, pola relasi hubungan antara negara terjalin dalam dua bentuk, yaitu kerja sama dan konflik. Kelompok realisme memandang bahwa interaksi yang terjadi didominasi konflik dan sulit mencapai bentuk kerja sama (Waltz, 2000). Sementara kelompok liberalisme meyakini bahwa hubungan antarnegara berlangsung dalam bentuk kerja sama, perdamaian bisa bersifat abadi. Oleh karena itu, perang tidak alami dan tidak masuk akal (Burchill & Linklater, 2019). Kerja sama menjadi pilihan politik bagi negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya jika masing-masing negara memiliki kepercayaan pada nilai-nilai yang sama (*shared ideas*), sedangkan konflik menjadi pilihan untuk mencapai kepentingan nasional jika masing-masing negara memiliki kepercayaan pada nilai yang berbeda dan bertentangan. Kedua pola relasi tersebut didasari pada konsep paling dasar dalam hubungan internasional, yaitu kepentingan nasional.

Kepentingan nasional sebagai dasar terjalinnya relasi antara negara merupakan konsep yang sangat abstrak dan didefinisikan secara berbeda oleh masing-masing aktor negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain, bahkan manifestasi empirisnya tergantung pada pemimpin negara. Bahkan perubahan kepentingan nasional dapat mendorong negara untuk mengevaluasi keanggotaan mereka dalam sebuah aliansi (Griffiths, Martin Roach & O'Callaghan, 2014). Berbeda dengan pandangan realisme yang memandang bahwa kepentingan nasional memiliki basis materi, dalam pandangan kelompok konstruktivisme, kepentingan nasional dimaknai sebagai sebuah konsep yang dinamis yang merupakan konstruksi sosial dan diproduksi secara intersubjektif dalam ranah pembuat kebijakan (Hussain & Abbas, 2020), artinya kepentingan nasional eksis karena adanya variabel-variabel pembentukannya misalnya identitas, sejarah dan variabel lain yang merupakan hasil kesepakatan intersubjektif antara para pengambil kebijakan.

Relasi antar-negara yang ditentukan oleh variabel-variabel konstruktivisme seperti bahasa, norma, identitas, dan budaya (McCourt, 2022), tergambar dalam konteks Timur Tengah, khususnya terkait dengan pola relasi antara negara-negara Islam atau negara berbasis umat Islam di Timur Tengah dalam menyikapi isu perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan Israel yang diinstitutionalkan dalam sebuah organisasi. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

merupakan bentuk organisasi yang terbentuk karena pola kesamaan identitas. OKI didirikan oleh 24 negara dengan tujuan pendirian untuk memperkuat solidaritas antarsesama Muslim dan di awal berdiri, OKI fokus dalam mengadvokasi persoalan Palestina, melindungi tempat suci Islam, dan memperkuat kerja sama ekonomi antar sesama anggota (Kayaoglu, 2015).

Kajian kawasan Timur Tengah memang penuh dengan kondisi konfliktual. Menurut Maarif, ada tiga bentuk malapetaka yang pernah dan sedang menimpa dunia Arab; Perang saudara, serbuan pasukan luar dan gabungan antara keduanya (Maarif, 2018). Faktor-faktor penyebab instabilitas Timur Tengah yang disebabkan faktor Internal antara lain perbedaan kepentingan sektoral antara negara Timur Tengah yang tidak dikelola dengan baik yang menyebabkan benih konflik diantara negara-negara Muslim Timur Tengah seperti eskalasi konflik antara Iran dan Arab Saudi yang sudah berlangsung pasca revolusi Iran tahun 1979 untuk memperebutkan superioritas Islam (Mabon, 2016).

Penyebab konflik yang paling signifikan di kawasan Timur Tengah terjadi ketika negara Israel dideklarasikan pada tahun 1948 (Nor & Zakaria, 2009). Berdirinya Israel sebagai sebuah negara berdaulat di kawasan Timur Tengah menjadi penyebab konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Israel dianggap bermasalah karena menganeksasi wilayah yang sudah dihuni oleh bangsa Palestina dan perluasan wilayah terus-menerus dilakukan oleh Israel dengan cara menginvasi wilayah Palestina. Pendapat tersebut diafirmasi oleh Hinnebusch bahwa terdapat dua penyebab konflik abadi di Timur Tengah yaitu perebutan ladang minyak dan berdirinya negara Israel pada tahun 1948 yang mengorbankan rakyat asli bangsa Palestina (Hinnebusch, 2003). Keduanya penyebab konflik tersebut masih berlangsung di kawasan Timur Tengah. Kemerdekaan Israel memunculkan sentimen Arab terhadap Yahudi atas nama kesamaan identitas.

Resistensi negara-negara Timur Tengah terhadap eksistensi Israel semakin meredup seiring dengan beberapa keputusan negara-negara Timur Tengah yang memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Mesir menjadi negara yang awal melakukan normalisasi dengan Israel pada tahun 1979 dan diikuti oleh Yordania yang melakukan keputusan yang sama pada tahun 1994 (Wicaksono, 2020).

Setelah kedua negara tersebut, gelombang normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Timur Tengah dengan Israel terjadi secara masif di tahun 2020. Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara pertama yang mendeklarasikan perjanjian damai dengan Israel pada tanggal 13 Agustus 2020, kemudian langkah UEA diikuti oleh Bahrain pada 11 September 2020. Deklarasi damai tersebut diformalisasikan dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Abraham (*Abraham Accords*) pada tanggal 15 September 2020. Selanjutnya Sudan yang selama ini dikenal sebagai negara Islam yang tegas terhadap dominasi Amerika Serikat (AS) dan Israel, ternyata mengambil tindakan yang sama tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2020 (Harb, 2020). Pada tanggal 10 Desember 2020, Maroko mengikuti jejak ketiga negara di atas dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel yang dimediasi oleh AS (cnnindonesia, 2020).

Jika Sudan membuka hubungan diplomatik dengan Israel agar dikeluarkan dari daftar hitam negara pendukung terorisme, maka lain halnya dengan Maroko yang mempunyai kepentingan agar wilayah Sahara Barat diakui sebagai bagian dari teritori Maroko. Pengakuan dari AS terhadap Sahara Barat sebagai bagian dari Maroko, sangat berarti bagi Maroko untuk melegitimasi kedudukannya di wilayah tersebut. Selama ini, wilayah Sahara Barat berada di bawah otoritas Front Polisario dan PBB juga mengakui bahwa wilayah tersebut bukan bagian dari Maroko (Rimapradesi & Sahide, 2021).

Gelombang normalisasi di atas tentunya menempatkan Palestina menjadi perhatian utama dalam fenomena normalisasi hubungan negara-negara Muslim Timur Tengah dengan Israel karena sejarah panjang penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Negara-negara Timur Tengah yang melakukan normalisasi menjadikan Palestina sebagai justifikasi seperti pemerintah UEA melalui Menteri Luar Negerinya, Anwar Gargash, mengatakan bahwa kesepakatan UEA dengan Israel yang termaktub dalam *Abraham Accords*, akan menjadi jalan diplomasi untuk mengakui kedaulatan Palestina (Harkov, 2020). Hal tersebut mengindikasikan bahwa relasi antara negara-negara Muslim Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari isu konflik Palestina-Israel. Meskipun demikian, klaim pihak UEA tersebut hanya sebagai pernyataan yang diharapkan mengurangi resistensi terhadap keputusannya berdamai dengan Israel.

Sampai saat ini, sudah banyak penelitian tentang fenomena normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Timur Tengah dengan Israel, namun mayoritas penelitian

menggunakan konsep kepentingan nasional. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Tahmi et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa normalisasi yang terjadi antara UEA dengan Israel didasari oleh empat kepentingan nasional, yaitu kepentingan keamanan, ekonomi, politik, dan perdamaian. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2020), yang menyimpulkan hasil penelitian yang hampir sama bahwa normalisasi hubungan UEA-Israel karena adanya kepentingan nasional UEA dalam bidang ekonomi dan politik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rimapradesi & Sahide, 2021) berjudul “Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko,” menarik kesimpulan bahwa selain kepentingan ekonomi, keempat negara juga melakukan normalisasi dengan pertimbangan adanya ancaman dari Iran, namun penelitian tersebut melihat ancaman dari perspektif realisme sementara penulis akan mengelaborasi penelitian yang sama dari perspektif konstruktivisme.

Tesis Sorkin dengan judul “*The Abraham Accords: the Culmination of a Decades-Long Normalization Process Between Israel and the UAE*” mengelaborasi faktor lanskap keamanan kawasan yang dipengaruhi oleh eksistensi Iran dan pengaruh AS dalam normalisasi yang terjadi (Sorkin, 2021). Namun tesis tersebut tidak menjelaskan lebih jauh mengenai prakondisi terjadi normalisasi di mana pihak yang berkepentingan melakukan serangkaian pertemuan yang menghasilkan pemahaman dan persepsi yang disepakati bersama.

Atas beberapa penelitian terdahulu, penulis akan mengisi gap penelitian yang belum dielaborasi oleh penelitian terdahulu, yaitu menganalisis proses terjadinya normalisasi dari perspektif konstruktivisme dengan menjelaskan secara runut serangkaian interaksi antar aktor sebelum terjadinya normalisasi. Implikasi dari normalisasi yang terjadi akan dikontekstualisasikan dengan harapan masa depan bangsa Palestina untuk menjadi negara merdeka.

Tinjauan Teoretis

Perspektif Konstruktivisme

Konstruktivisme hadir memberikan warna baru dalam melihat berbagai fenomena interaksi internasional dari sudut pandang yang berbeda. Konstruktivisme memandang struktur sosial sesuatu yang diterjemahkan melalui pemahaman, harapan dan

pengetahuan yang disepakati bersama. Tatanan sosial pada dasarnya objektif dan nyata tetapi objektivitasnya sangat bergantung pada pengetahuan bersama (Wendt, 1995). Konstruktivisme dapat ditempatkan dalam tiga pemahaman yaitu pertama, level metafisik, konstruktivisme berusaha untuk menginterpretasikan realitas. Kedua, konstruktivisme sebagai sebuah teori sosial mengenai peran pengetahuan dan aktor dalam konstruksi realitas sosial. Ketiga, konstruktivisme sebagai sebuah teoritis hubungan internasional yang melahirkan pertanyaan penting dan baru misalnya peran identitas, norma, pemahaman bersama, dan kekuatan dalam penyusunan kepentingan nasional, konstruksi sosial tentang teritori baru dan kawasan transnasional non-teritori (Adler, 2013).

Dalam melihat tindakan sebuah negara terhadap negara lain seperti misalnya invasi maupun agresi militer, konstruktivisme berbeda dengan pandangan realisme yang memandang bahwa semua tindakan dalam interaksi internasional didorong oleh kepentingan nasional sebuah negara, sedangkan konstruktivisme memandang hal yang berbeda terkait hal tersebut. Bagi konstruktivis, norma-norma internasional lebih mempengaruhi tindakan negara ketimbang dorongan kepentingan nasional dan kepentingan nasional adalah derivasi dari norma-norma internasional.

Tokoh yang paling berpengaruh terhadap perkembangan konstruktivisme dalam kajian hubungan internasional salah satunya adalah Wendt melalui artikelnya yang berjudul “*Anarchy is What States Makes of It*” (1992) dan “*Constructing International Politics*” (1995). Wendt menjelaskan bahwa konstruktivisme memandang berakhirnya Perang Dingin bukan disebabkan oleh kemenangan AS namun cenderung melihat prakondisi yang terjadi, yaitu adanya konstruksi ide yang diaplikasikan oleh Mikhail Gorbachev yang menganggap bangsa Barat bukan lagi musuh Uni Soviet (Wendt, 1992). Hal tersebut menandakan bahwa dasar analisis konstruktivisme tidak berdasarkan pada peristiwa empiris namun mencoba mengelaborasi prakondisi apa yang terjadi sebelum terjadinya sebuah peristiwa. Prakondisi yang dimaksud adalah intersubjektif antara aktor yang dipengaruhi berbagai faktor antara lain kesamaan ide, identitas dan kepentingan yang pada akhirnya membentuk pemahaman bersama.

Poin-poin penting dalam konstruktivisme yang dipaparkan oleh Wendt yang relevan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis antara lain: struktur sosial terbentuk oleh pemahaman bersama, harapan dan pengetahuan. Wendt memberikan

contoh bahwa komunitas keamanan terdiri dari pengetahuan bersama ketika antarnegara saling percaya untuk menyelesaikan konflik tanpa perang (Wendt, 1995).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) dan menafsirkan (*to interpret*) sebuah perilaku atau interaksi sosial. Penelitian kualitatif berusaha menemukan makna, proses dan konteks sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang diamati (Bakry, 2016). Pada dasarnya bahwa penelitian kualitatif tersebut menyadarkan hasil penelitian dari kekuatan analitik sehingga Peneliti dituntut untuk mampu menggunakan teori yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti.

Penulis melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh yang concern dalam kajian Timur Tengah. Selanjutnya, data hasil wawancara dengan metode *semi structured in depth interview* dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada Responden terhadap poin-poin yang menyangkut penelitian namun dalam proses wawancara, terdapat beberapa pertanyaan tambahan dari penulis. Responden yang diwawancarai penulis antara lain Yon Machmudi yang menjabat sebagai ketua pascasarjana kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Faisal Assegaf, Jurnalis yang fokus pada kajian Timur Tengah sekaligus pendiri albalad.co. Yanuardi Syukur, pendiri *center for Islamic and Global Studies (CIGS)*, mantan Sekjen the *Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)*, Teuku Rezasyah, dosen FISIP Universitas Padjadjaran, dan Imam Shamsi Ali, Imam di *Islamic Center of New York* dan direktur Jamaica Muslim Center.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa buku, jurnal, tesis, website resmi, dan semua sumber yang sudah diverifikasi keabsahan datanya. Tentunya bahwa data yang diolah dalam menjelaskan masalah penelitian adalah data yang relevan. Data penunjang lainnya adalah wawancara dengan para akademisi dan peneliti yang pakar di bidang kajian kawasan Timur Tengah untuk menguatkan argumen pada hasil penelitian. Data yang sudah diperoleh dan dianalisa dijadikan dasar dalam mendeskripsikan dan menganalisa kejadian yang sedang terjadi kemudian disimpulkan sesuai dengan hasil analisa dari sumber yang sudah diolah.

Prakondisi Terjadinya Normalisasi Negara-Negara Timur Tengah dengan Israel

AS dan Arab Saudi menjadi aktor berpengaruh dalam proses normalisasi tersebut. Normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Muslim Timur Tengah dengan Israel tidak akan terjalin tanpa adanya dukungan penuh dari AS termasuk sikap permisif Arab Saudi terhadap Israel selama ini (Imam Shamsi Ali, wawancara via zoom, 11 Februari 2022). Terdapat berbagai peristiwa yang menjadi kondisi awal pemicu gelombang normalisasi hubungan negara-negara Muslim Timur Tengah dengan Israel. Peristiwa pertama adalah gelombang *Arab Spring* yang terjadi di seantero negara-negara Timur Tengah. *Arab Spring* dimaknai sebagai gerakan rakyat yang pro-demokrasi yang menuntut perubahan dalam tatanan politik Timur Tengah (Machmudi, 2021).

Seluruh pemimpin di negara Timur Tengah khawatir terhadap gelombang rakyat yang menuntut reformasi pemerintahan. Kondisi di negara yang satu akan mempengaruhi kondisi di negara lain. Kondisi tersebut akhirnya membuat rezim di negara-negara Timur Tengah yang konservatif mencari sekutu untuk menjaga *status quo* dari tekanan rakyat yang ingin melakukan demokratisasi. Israel sebagai negara yang unggul dalam bidang militer dan teknologi menjadi peluang tersendiri bagi rezim *status quo* untuk mendapatkan dukungan dalam melanggengkan pemerintahan mereka.

Perang proksi yang semakin besar setelah gelombang peristiwa *Arab Spring* membuat negara-negara di Timur Tengah menguatkan koalisi masing-masing. Israel yang sebelumnya dianggap musuh bersama oleh seluruh bangsa Arab, sudah masuk dalam koalisi Arab Saudi (Nawaz, 2022). Salah satu dampak dari konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah antara sesama negara Timur Tengah membuat beberapa negara yang memang sudah menjalin hubungan lama dengan Israel akhirnya mendeklarasikan hubungan resmi dengan Israel.

Identitas cukup mewarnai peta Proksi dalam gelombang *Arab Spring*. Iran selalu berada di pihak yang menganut mazhab Syiah, seperti mendukung pemerintah Bashar al-Assad, kelompok oposisi Houthi di Yaman, gerakan Hizbullah di Lebanon dan termasuk kepada kelompok oposisi di Bahrain yang mayoritas Syiah (Gause, 2014). Arab Saudi sendiri berada di pihak sebaliknya. Arab Saudi berafiliasi dengan Israel dan AS mendukung kelompok yang mayoritas Sunni. Pertarungan identitas dalam gelombang *Arab Spring* tersebut tidak bisa dinafikan sebagai salah satu faktor yang akhirnya menenggelamkan kawasan Timur Tengah dalam arena perang proksi.

Sebagaimana pandangan kelompok konstruktivisme yang meyakini bahwa struktur kemudian menjadi penyatu bagi manusia, ditentukan oleh gagasan atau pandangan yang mereka sepakati dan diyakini bersama (Pramono & Purwono, 2010), demikian halnya yang terjadi pada fenomena *Arab Spring*. Peristiwa tersebut dimaknai berbeda oleh masing-masing negara yang berkepentingan. Apa yang terjadi di Suriah dimaknai berbeda antara Arab Saudi dan AS di satu pihak dan Iran di pihak yang berseberangan. Arab Saudi dan AS membenarkan tindakan oposisi Suriah sedangkan Iran mendukung pihak Pemerintah Suriah.

Penulis akan menguji argumen dari konstruktivisme yang terkait dengan signifikansi identitas dalam fenomena *Arab Spring*. Wendt memetakan tipologi dalam empat macam identitas yang salah satunya adalah identitas kolektif (Wendt, 2000). Identitas kolektif yang dimaksud adalah kesamaan perasaan dan pikiran antara negara yang satu dengan yang lain. Identitas kolektif tersebut terbentuk dari serangkaian interpretasi antara negara yang kemudian melahirkan kesepakatan bersama. Jika ditarik dalam kasus *Arab Spring* bahwa ada interaksi antara negara-negara Arab-Sunni dengan Israel maupun AS yang pada akhirnya melahirkan konsepsi ancaman dari Iran sehingga dalam serangkaian gelombang *Arab Spring*, Iran senantiasa dianggap negara yang membahayakan stabilitas kawasan Timur Tengah.

Identitas kolektif yang terbentuk kemudian lebih jauh melahirkan realitas politik lainnya seperti normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Muslim Timur Tengah dengan Israel. Fenomena normalisasi tersebut semakin meningkatkan konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Kondisi ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi AS dan Israel karena dengan jatuhnya negara-negara Muslim Timur Tengah dalam pusaran konflik *interstate* maka kedua negara tersebut semakin menegaskan hegemoninya di kawasan Timur Tengah. Bahkan perkembangan selanjutnya menunjukkan fenomena AS dan Israel tidak terlibat langsung dalam konflik namun berada di belakang layar.

Kondisi kedua yang menjadi penyebab awal proses normalisasi terjalin antara negara-negara Muslim Timur Tengah dengan Israel adalah dominasi Iran yang semakin kuat di kawasan Timur Tengah. Iran menjadi salah satu aktor dominan yang ikut mempengaruhi lanskap geopolitik Timur Tengah, bahkan Iran bersama dengan AS adalah dua aktor berpengaruh terhadap fluktuasi keamanan Timur Tengah. Hubungan

Iran dan AS yang berada pada titik nadir menjadi salah satu penyebab instabilitas keamanan dan perdamaian kawasan Timur Tengah (Jalalpoor & Sharfi, 2016). Hubungan kedua negara tersebut diperparah karena kedua negara menganggap rivalnya adalah ancaman nyata. Persepsi ini yang menjadi kajian utama dalam perspektif konstruktivisme dan merupakan penyebab utama terbentuknya konstruksi sosial dan pakta material yang empiris.

Hal tersebut di atas tergambar dari negara-negara Arab-Sunni yang berdamai dengan Israel. Misalnya Bahrain, meskipun mayoritas penduduknya adalah penganut Syiah, namun raja Bahrain yang berkuasa, Hamad bin Isa al-Khalifah adalah seorang Sunni. *Arab Spring* memetakan konflik antara Persia-Syiah dengan Arab-Sunni (Mervin et al., 2013). Selain itu, isu sektarian dalam internal Bahrain sangat kuat. Terjadi diskriminasi dari pemerintah terhadap warga Syiah misalnya dilarang menduduki posisi strategis di lembaga pemerintahan dan perusahaan minyak. Sedangkan pemerintah Bahrain menerima imigran Sunni kemudian memberikan kewarganegaraan ganda dan pemerintah Bahrain juga menyiapkan lapangan kerja sementara warga Syiah Bahrain menghadapi masalah pengangguran (Tamburaka, 2011).

Isu sektarian dalam politik domestik Bahrain dijadikan dasar untuk mengidentifikasi kesamaan identitas antara warga Syiah Bahrain dengan Iran. Pemerintah Bahrain menganggap warganya yang Syiah menjadi ancaman dan didukung oleh Iran sebagai sebuah negara yang merepresentasikan identitas Syiah. Pada akhirnya konsepsi ancaman Iran menjadi kerangka dasar kebijakan luar negeri Bahrain terhadap kawasan Timur Tengah. Bahrain cenderung sepakat dengan negara lain yang juga menganggap Iran sebagai ancaman kawasan.

Identitas Arab sangat berpengaruh dalam peta politik Timur Tengah. Raja Salman melalui doktrin politiknya dengan sangat jelas mengedepankan identitas Arab sebagai jalan persatuan bagi negara Arab lain. Beberapa prinsip utama doktrin Raja Salman antara lain pertama, bangsa Arab mampu dan mau membela diri, kedua, Iran adalah ancaman bagi persatuan dan stabilitas Arab yang harus dicegah. Ketiga, bangsa Arab dapat memberikan alternatif terhadap *status quo* dan narasi Iran di kawasan. Keempat, apa yang menyatukan bangsa Arab lebih penting daripada apa yang memisahkan mereka. Kelima, bangsa Arab mampu mendefinisikan momen dan menulis narasi mereka sendiri (Shabaneh, 2015). Doktrin Raja Salman tersebut sangat kental

menjadikan isu sektarian sebagai wacana untuk mengkonstruksi realitas politik di kawasan Timur Tengah dan memiliki tendensi untuk membedakan identitas dengan Persia-Syiah.

Sebagaimana halnya dengan keempat negara Muslim Timur Tengah yang sudah melegitimasi hubungan diplomatik dengan Israel, pada dasarnya Arab Saudi juga sudah menjalin hubungan yang sangat erat dengan Israel meskipun hubungan diplomatik antara keduanya belum dideklarasikan. Alih-alih Arab Saudi membela kepentingan Palestina, mereka bahkan lebih khawatir terhadap dominasi Iran yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah (Rynhold & Yaari, 2019). Arab Saudi dan AS bahkan secara proaktif melakukan mediasi dengan negara-negara Muslim Timur Tengah untuk berdamai dengan Israel. Ada kepentingan para aktor yang mengkonstruksi fenomena normalisasi yaitu kesepakatan antara Arab Saudi dan AS (Xu et al., 2021). Realitas politik yang terwujud dalam normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Muslim Timur Tengah dengan Israel adalah manifestasi dari konstruksi sosial yang disepakati antara AS, Israel dan Arab Saudi untuk mencegah dominasi Iran yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah khususnya pada saat pecahnya peristiwa *Arab Spring*.

Normalisasi Hubungan Diplomatik UEA dengan Israel

Tanggal 15 September 2021 tepatnya di Washington, AS, Benjamin Netanyahu bersama Menteri Luar Negeri UEA, Abdullah bin-Zayed al-Nahyan dan Presiden AS, Donald Trump menandatangani perjanjian damai “*Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full Normalization*,” yang menandai babak baru hubungan diplomatik UEA dengan Israel (Krasna, 2021). Penandatanganan perjanjian damai tersebut hanya momentum dari hubungan dekat yang terjadi selama ini yang berlangsung secara laten.

Proses terjalinnya hubungan diplomatik antara UEA dengan Israel terjadi salah satunya atas andil Haim Saban, seorang Investor dan pengusaha pemilik media di Amerika Serikat. Haim Saban membuka jalan bagi terciptanya normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel yang dimulai ketika terdapat pertemuan dua tahun sebelumnya. Sejak saat itu, Haim Saban terus menjalin hubungan dengan pihak Uni Emirat Arab melalui Yousef Al Otaiba, duta besar untuk Washington (Zweiri, 2020). Sebagai seorang pengusaha media, Haim Saban melakukan framing melalui media dalam

mendorong hubungan baik antara UEA dengan Israel. Hal tersebut tentunya atas kesepakatan-kesepakatan yang sudah terjalin sebelumnya antara pemerintah UEA dan Israel yang kemudian dimanifestasikan dalam proses konstruksi realitas sosial melalui media.

Analisis yang umum bahwa UEA memiliki alasan kuat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu kepentingan ekonomi dan mengimbangi dominasi Iran di kawasan Timur Tengah. Langkah awal UEA dalam melawan hegemoni Iran tercermin dari kerja sama militer dengan Israel maupun dengan AS di tahun-tahun sebelum terjadinya normalisasi. Pada tahun 2017, UEA berpartisipasi dalam Latihan militer gabungan bersama Israel, AS dan Italia yang diadakan di Yunani (Cohen, 2017). UEA juga mengharapkan dapat membeli peralatan militer dari AS ketika normalisasi dengan Israel sudah terwujud.

Terlepas dari kepentingan ekonomi dan militer sebagai sebuah realitas sosial yang dapat diidentifikasi, namun sesungguhnya terdapat kepentingan bersama antara UEA dan Israel yang mendahului kepentingan ekonomi dan militer sebagaimana disebutkan di atas. Sikap UEA tidak lepas dari kecemasan atas pengaruh Iran yang semakin luas di kawasan Timur Tengah dan dipandang sebagai sebuah ancaman serius oleh negara-negara Teluk termasuk UEA (Dazi-Héni, 2020). Kekhawatiran negara-negara Muslim Timur Tengah yang merupakan Arab-Sunni termasuk UEA menganggap bahwa konsepsi ancaman kawasan Timur Tengah bukan lagi dari Israel namun ancaman yang dikonstruksi berasal dari Iran yang semakin ekspansional di kawasan dengan paham Syiah. Kekhawatiran negara-negara Muslim Timur Tengah yang merupakan Arab-Sunni disebabkan karena Iran sangat reaktif dalam membantu kelompok Syiah pada periode gelombang *Arab Spring*.

Sikap UEA yang mengubah persepsi ancaman terhadap kawasan Timur Tengah dari yang sebelumnya datang dari Israel kemudian pada perkembangannya menganggap Iran sebagai ancaman. Kekhawatiran UEA terhadap Iran sama sekali bukan disebabkan karena sikap Iran yang memperkuat militernya namun makna dan ide yang diyakini oleh UEA yang merupakan hasil intersubjektivitas pertemuan panjang dengan Arab Saudi, AS dan Israel. Sikap UEA terhadap Iran mengafirmasi pandangan konstruktivisme yang menyatakan bahwa tindakan, interaksi, dan persepsi membentuk realitas. Karenanya, pikiran dan tindakan itu secara nyata membangun hubungan internasional (Theys,

2017). Perubahan persepsi ancaman tidak lepas dari pertarungan identitas antara Arab Saudi dan Iran yang ingin tampil sebagai pelindung Islam di kawasan Timur Tengah yang mengedepankan identitas yang dimiliki masing-masing negara (Chubin, 2012).

Normalisasi Hubungan Diplomatik Bahrain dengan Israel

Setelah keputusan UEA melakukan normalisasi dengan Israel, Hal yang sama ditempuh oleh Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif al-Zayani yang menandatangani deklarasi damai dan kerja sama dengan Israel (Krasna, 2021). Normalisasi Bahrain dengan Israel dipengaruhi oleh beberapa faktor selain alasan untuk mengimbangi kekuatan Iran. Kondisi internal Bahrain juga menjadi salah satu penyebab pihak Bahrain memutuskan untuk berdamai dengan Israel. Pemerintah Monarki Bahrain menghadapi kelompok oposisi yang merupakan mayoritas penganut Syiah. Kelompok oposisi tersebut sudah melakukan tindakan delegitimasi terhadap monarki Bahrain sejak 2011 atau tepatnya di awal pecahnya peristiwa *Arab Spring*. Kerusuhan tersebut menyebabkan instabilitas ekonomi domestik Bahrain. Monarki Bahrain yang dipimpin oleh Hamad bin Isa Al Khalifa yang bermazhab Sunni, membutuhkan penjaga keamanan dari negara Arab-Sunni seperti Arab Saudi karena mayoritas rakyat Bahrain adalah Syiah yang mencapai 66-70 persen (Firmansyah, 2016).

Komunitas Syiah tersebut lebih dekat dengan Iran. Selain itu, Bahrain adalah salah satu mitra terbaik AS di kawasan Timur Tengah bahkan Bahrain merupakan tuan rumah kelima armada Angkatan Laut AS dan tergabung dalam koalisi militer pimpinan Amerika Serikat melawan kelompok ISIS (State.gov, 2020). Kedekatan tersebut membuat AS dengan mudah memediasi normalisasi hubungan Bahrain dengan Israel. Bahkan normalisasi Bahrain dengan Israel memberikan dampak yang sangat signifikan. Satu tahun setelah penandatanganan perjanjian, progres kerja sama melebihi ekspektasi karena sudah terjadi lebih dari 70 pertemuan, kegiatan gabungan, perjanjian di berbagai bidang termasuk ekonomi, perdagangan, teknologi, energi, lingkungan hidup, kesehatan, pariwisata, dan penerbangan (Podeh, 2022). Percepatan kerja sama tersebut sebagai bentuk dari bagaimana kedua belah pihak ingin menunjukkan kepada Iran bahwa kekuatan mereka sangat solid dalam berbagai hal.

Arab Saudi memiliki peran yang signifikan dalam proses normalisasi dengan Israel. Sebelum diumumkan secara resmi, Arab Saudi melakukan komunikasi dengan

Amerika Serikat selama 29 hari. Momen tersebut dijadikan pintu bagi Amerika Serikat untuk mendapatkan persetujuan dari Arab Saudi, bahkan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dihubungi langsung oleh penasihat politik Trump, Jared Kushner dalam rangka meyakinkan Arab Saudi untuk merestui normalisasi hubungan diplomatik Bahrain-Israel (Rahman, 2020). Tidak mengherankan jika Arab Saudi sangat berperan dalam normalisasi hubungan Bahrain-Israel karena Bahrain memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Arab Saudi khususnya dalam bidang ekonomi dan militer. Bantuan Arab Saudi di bidang ekonomi dalam bentuk paket bantuan mencapai US\$ 20 miliar melalui organisasi Dewan Kerjasama Teluk (Barany, 2013). Bantuan tersebut dalam rangka memperkuat koalisi Arab Saudi diantara negara-negara Arab. Sedangkan Arab Saudi memberikan dukungan militer kepada Bahrain untuk mengatasi eskalasi pemberontakan dari kelompok Syiah Bahrain terhadap pemerintah (Wicaksana, 2015).

Normalisasi Hubungan Diplomatik Sudan dengan Israel

Berbeda dengan UEA dan Bahrain yang sejak awal sudah memiliki hubungan yang dekat dengan AS, Sudan sendiri merupakan negara Muslim di tanduk Afrika yang selama ini masif melakukan perlawanan terhadap dominasi AS di Timur Tengah dan secara aktif membela perjuangan bangsa Palestina untuk lepas dari penjajahan Israel. Salah satu faktor keputusan politik Sudan berdamai dengan Israel disebabkan oleh kepentingan mereka untuk lepas dari daftar negara pendukung aksi terorisme yang dirilis oleh AS. Warisan politik rezim presiden Omar Hassan al-Basir (1989-2019) membuat Sudan mengalami isolasi internasional karena dianggap melindungi kelompok terorisme.

Dampak isolasi tersebut menyebabkan instabilitas politik domestik Sudan serta menyebabkan kondisi perekonomian Sudan semakin terpuruk dan warisan utang yang mencapai 60 miliar dollar AS. Sudan dengan jumlah penduduk mencapai 45 juta jiwa dengan pendapatan per kapita hanya sekitar 808 dollar AS (Rahman, 2021). Sebelum terjalannya normalisasi hubungan Sudan dengan Israel, negara donor Sudan menyepakati akan menghapus utang mencapai 14 miliar dollar AS dari total 60 miliar dollar AS utang luar negeri Sudan (Rahman, 2021).

Kepentingan ekonomi dan politik tersebut tentunya hanya sebagai realitas politik dari sebuah perubahan politik di internal Sudan pasca mundurnya presiden Sudan, Omar al-Bashir pada tahun 2019 (cnnindonesia.com, 2019). Delegitimasi Omar al-Bashir sebagai presiden Sudan tentu menjadi faktor signifikan dalam mengubah pola hubungan Sudan dengan AS dan Israel. Sebelumnya, Omar al-Bashir adalah salah satu sekutu dekat Iran di Afrika bahkan AS menganggap bahwa salah satu ancaman terbesar di Afrika adalah “*poros Khartoum-Teheran*” karena diyakini bertujuan memperluas agama dan pengaruh di Afrika (Harris, 1999).

Sudan melakukan *secret diplomacy* dengan pihak Israel sebelum mendeklarasikan hubungan diplomatik mereka. Tanggal 3 Februari 2020, ketua dewan kedaulatan Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengadakan pertemuan rahasia dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang dilangsungkan di Uganda (Bassist, 2021). Dalam pertemuan rahasia tersebut, mereka sepakat untuk melakukan hubungan diplomatik antara Sudan dengan Israel.

Instabilitas domestik Sudan turut mempengaruhi keputusan politik untuk melakukan normalisasi dengan Israel. Perubahan politik domestik Sudan yang sebelumnya dekat dengan Iran kemudian berubah dengan keputusan pemerintah yang membuka diri terhadap AS tentunya mengafirmasi tindakan Sudan yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel karena adanya interaksi yang terjalin dengan AS. Kepentingan ekonomi hanya sebuah manifestasi dari kesepakatan bersama antara AS dan pemerintah Sudan yang baru.

Normalisasi Hubungan Diplomatik Maroko dengan Israel

Sementara itu, Maroko menjadi negara Timur Tengah keempat di tahun 2020 yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Keputusan politik pemerintah Maroko berdamai dengan Israel salah satunya didasarkan pada kalkulasi ekonomi dan politik. Konsekuensi dari kesepakatan damai antara Maroko dengan Israel adalah pengakuan AS atas kedaulatan Maroko terhadap Sahara Barat (Rimapradesi & Sahide, 2021). Wilayah tersebut sudah menjadi sengketa antara Maroko dengan organisasi pergerakan kemerdekaan Sahara Barat (Front Polisario) selama bertahun-tahun karena Maroko memiliki kepentingan ekonomi untuk mendapatkan sumber daya alam deposit fosfat. Manfaat langsung yang diterima Maroko pasca normalisasi hubungan dengan Israel

adalah AS menjual empat drone canggih amunisi berpemandu presisi dengan nilai mencapai 14,1 triliun (Sicca, 2020). Selain itu, Maroko dan Israel kemudian menyepakati kerja sama dalam hal pengelolaan air, keringanan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan juga menghubungkan sistem penerbangan dan keuangan. Nilai investasi antara kedua negara tersebut mencapai 42 triliun rupiah (Pristiandaru, 2020). Sebuah angka yang cukup besar bagi Maroko yang sedang berjuang menstabilkan kondisi perekonomian yang ambruk karena badai pandemi Covid-19.

Statistik bantuan ekonomi dan keuntungan politik yang diperoleh Maroko merupakan realitas politik hanya merupakan manifestasi dari kesepakatan antara Maroko, Arab Saudi, AS, dan Israel. Motif Maroko melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dapat diidentifikasi dari kedekatan hubungan Maroko dengan Arab Saudi. Pada tahun 2018, raja Salman bin Abdulaziz dan raja Maroko, Mohammed VI membuat sebuah kesepakatan untuk bekerja sama menghadapi dominasi Iran. Selain itu, hubungan antara Maroko memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran karena Maroko menganggap bahwa Iran mendukung Front Polisario yang berhak atas wilayah Sahara Barat yang diklaim oleh Maroko (Aminuddin, 2018).

Keputusan politik Maroko tersebut didukung secara penuh oleh Arab-Sunni lainnya yaitu UEA dan Bahrain. Dua negara yang juga melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal menjustifikasi argumen konstruktivisme bahwa pada dasarnya, sebelum terjalannya normalisasi antara Maroko dengan Israel pada tahun 2020, sudah terjadi kesepakatan antara Arab Saudi, Bahrain, UEA, dan Maroko yang meyakini nilai yang disepakati bersama bahwa ancaman terhadap kawasan Timur Tengah berasal dari Iran. Argumen ini sejalan dengan perspektif konstruktivisme yang menyatakan bahwa realitas sosial tersebut, dalam hal ini normalisasi, terbentuk dari konstruksi sosial secara intersubjektif (Wendt, 1992).

Terdapat tiga tokoh kunci yang berperan dalam mewujudkan normalisasi hubungan Maroko-Israel. Tokoh tersebut adalah penasihat Raja Maroko Mohammed VI, Andre Azoula; penasihat keamanan nasional Israel, Meir Ben-Shabbat; dan pengusaha Maroko keturunan Yahudi, Yariv Elbaz. Ketiga tokoh tersebut bekerja sebagai sebuah tim untuk mewujudkan proyek “normalisasi hubungan Israel-Maroko” (Rahman, 2020). Ketiga tokoh Yahudi tersebut yang selanjutnya melakukan komunikasi yang intens dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Pangeran Mohammed bin Zayed, dan

Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Selain itu, Maroko memang dikenal sebagai salah satu negara Timur Tengah yang permisif terhadap bangsa Yahudi.

Bahwa sesungguhnya konsepsi ancaman dari Iran sudah terlebih dahulu ada di dalam ide pengambil kebijakan negara-negara Muslim Timur Tengah sebelum mereka memanasifikannya dalam sebuah realitas politik yang disebut dengan normalisasi. Dibalik fakta material termasuk kepentingan ekonomi maupun militer, namun sesungguhnya bahwa terdapat ide dan motif para aktor yang terbentuk sebelum momentum normalisasi, yaitu perubahan konsepsi ancaman. Pihak Iran mendukung Front Polisario sehingga membuat pemerintah Maroko mempersepsikan ancaman berasal dari Iran. Hal ini menandakan bahwa pada dasarnya, ada motif para aktor yang terjadi sebelum realitas politik tercipta.

Telaah Konstruktivisme dalam Konteks Fenomena Normalisasi

Konstruktivisme mengafirmasi sikap politik yang ditempuh oleh negara-negara Muslim Timur Tengah yang memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara Timur Tengah membangun konstruksi sebuah persepsi ancaman yang datang dari Iran sedangkan Israel dan AS tidak lagi dianggap sebagai sebuah ancaman. Hal tersebut disebabkan karena negara-negara Timur Tengah memiliki kesepakatan bersama dengan Israel dan AS bahwa sesungguhnya ancaman kawasan datang dari Iran. Faktor lain yang membuat Iran dipersepsikan sebagai ancaman kawasan karena adanya kondisi konfliktual antara identitas yang melekat pada negara-negara Arab dan Iran yaitu sejarah Panjang konflik Arab-Sunni dengan Persia-Syiah. Konflik sektarian antara Arab-Sunni dan Persia-Syiah menjadikan polarisasi konflik di Timur Tengah semakin meluas bahkan menyeret negara-negara Muslim di seluruh dunia terlibat dalam wacana konflik.

Kondisi sebagaimana yang digambarkan oleh Wendt mengenai relasi antara AS, Inggris dan Korea Utara di atas menunjukkan bahwa AS lebih khawatir terhadap 5 nuklir Korea Utara dibandingkan dengan 500 nuklir yang dimiliki Inggris. Hal tersebut disebabkan karena Inggris adalah sekutu AS sedangkan Korea Utara dipersepsikan sebagai musuh. Argumen Wendt tersebut akan dijadikan dasar bagi penulis menganalisis bagaimana negara-negara Arab lebih khawatir terhadap Iran yang

dipersepsikan sebagai ancaman kawasan dibandingkan dengan Israel yang pada realitasnya terus menerus melakukan penyerangan terhadap Palestina. Realitas tersebut menjustifikasi argumen konstruktivisme bahwa fakta material tidak berarti apa-apa sebelum diberikan makna oleh aktor.

Konsepsi ancaman sendiri dalam ranah konstruktivisme merupakan sebuah realitas politik yang terbentuk bukan secara mekanis namun terlebih dahulu ada dalam benak para pembuat kebijakan sebagaimana yang disampaikan Wendt bahwa pada dasarnya, kebijakan yang diambil oleh sebuah negara merupakan hasil dari konstruksi yang dibangun menurut kerangka pemikiran negara tersebut. Pada prinsipnya dengan menggunakan konstruktivisme bahwa normalisasi antara negara-negara Muslim Timur Tengah dan Israel muncul setelah adanya kesepakatan antara negara yang terlibat, menyepakati bahwa ancaman kawasan berasal dari Iran sehingga diperlukan sebuah aliansi untuk menjaga keamanan kawasan. Dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa pada dasarnya, normalisasi bukan sebuah faktor yang menentukan (*determining factor*) namun sebaliknya, faktor penentu adalah kesepakatan bersama antara negara-negara Muslim Timur Tengah dengan Israel dan Amerika Serikat. Kesepakatan bersama tersebut muncul dari berbagai faktor yang melekat dalam diri pengambil kebijakan berupa identitas, ide dan kepentingan yang akan diwujudkan.

Penegasan penulis tentang konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian ini bahwa penulis tetap menyajikan kepentingan ekonomi, politik maupun militer sebagai fenomena yang empiris namun data-data tersebut hanya digunakan untuk mengafirmasi adanya motif maupun ide dari para aktor dalam menciptakan realitas politik yang ada. Artinya realitas politik berupa kepentingan di berbagai bidang, tetap mendapatkan ruang pada ranah konstruktivisme, namun hanya sebagai variabel terikat yang mana variabel bebas adalah motif maupun identitas yang melekat pada aktor. Semua realitas muncul dari hasil konstruksi sosial yang melibatkan interaksi yang terjalin dengan baik antara para aktor.

Dalam perspektif konstruktivisme, negara-negara Muslim Timur Tengah yang memutuskan untuk berdamai dengan Israel didasari oleh nilai yang disepakati bersama tentang keamanan regional kawasan Timur Tengah. Kesepakatan bersama yang dimaksud merupakan sebuah konstruksi atas ancaman baru bagi kawasan yaitu kesamaan ide dan nilai bahwa ancaman regional tidak lagi datang dari Israel melainkan

dari Iran. Normalisasi hubungan yang terjadi antara negara-negara Muslim Timur Tengah dan Israel disebabkan karena interaksi yang terjalin dengan baik antara aktor yang terlibat dalam normalisasi dan menciptakan tujuan bersama untuk mendelegitimasi dominasi Iran di Timur Tengah. Pola konstruktivisme yang terjadi dalam fenomena normalisasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah dari analisis penulis menggunakan perspektif Konstruktivisme menurut Wendt

Implikasi Normalisasi Terhadap Prospek Kemerdekaan Palestina

Normalisasi hubungan negara-negara Muslim Timur Tengah dengan Israel memiliki implikasi langsung terhadap perjuangan bangsa Palestina. Beberapa implikasi yang ditimbulkan antara lain: Pertama, keputusan untuk melakukan normalisasi yang pada dasarnya berdasarkan atas kalkulasi politik yang dilakukan oleh pejabat negara namun pada proses selanjutnya, negara-negara yang melakukan normalisasi mempromosikan ke publik bahwa keputusan politik untuk berdamai dengan Israel karena permintaan dari rakyat. Negara-negara tersebut mendemonstrasikan bahwa normalisasi pada dasarnya adalah koeksistensi antara dua bangsa dan perdamaian antara dua negara yang kemudian berdampak pada perdamaian kawasan Timur Tengah (Ibrahim, 2021).

Kedua, bangsa Arab semakin permisif terhadap Israel. Israel menjadi koalisi terbaik bagi negara-negara Muslim Timur Tengah yang sudah melakukan normalisasi. Terminologi konvensional tentang kawan dan lawan sudah usang dalam kamus negara-negara Muslim Timur Tengah yang sudah melakukan normalisasi. Israel yang sejak mendeklarasikan kemerdekaannya dianggap sebagai musuh bagi bangsa Arab, namun mulai berubah dan diterima sebagai teman terbaik. Pada tahap yang lebih ekstrim, perjuangan bangsa Palestina untuk melawan tindakan penjajahan dari Israel dianggap sebagai sebuah tindakan teroris oleh bangsa Arab.

Ketiga, isu Palestina sudah tidak lagi menjadi prioritas utama bagi negara-negara Muslim Timur Tengah dan hanya dijadikan sebagai isu untuk kepentingan sektoral. Hal ini berdampak pada menurunnya simpati dari negara-negara Timur Tengah. Keempat, normalisasi juga akan berdampak secara psikologis terhadap negara-negara Muslim Timur Tengah lainnya untuk melakukan keputusan yang sama. Iming-iming bantuan ekonomi maupun keamanan dari AS tentunya menggiurkan bagi negara-negara Muslim Timur Tengah lainnya seperti Oman untuk ikut serta melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Kelima, normalisasi akan mengaburkan pandangan generasi masa depan bangsa Arab. Normalisasi yang terjadi saat ini tentunya tidak hanya berdampak secara instan untuk masa sekarang namun dampak yang jauh lebih mengerikan adalah di masa mendatang ketika pergantian generasi (Ibrahim, 2021). Keputusan normalisasi akan mewariskan sebuah persepsi yang berbeda terhadap tindakan Israel. Jika sebagian besar negara-negara Muslim Timur Tengah sudah melakukan normalisasi maka jauh di masa mendatang, Israel akan dianggap sebagai tokoh protagonis sedangkan Palestina akan dipersepsikan sebagai tokoh antagonis karena distorsi sejarah yang terjadi secara terus menerus.

Palestina sebagai isu sentral dalam fenomena normalisasi, sejatinya sama sekali tidak merasakan dampak positif namun sebaliknya, dampak yang diterima cenderung merugikan pihak Palestina. Menurut Yon Machmudi bahwa terdapat beberapa poin yang merupakan dampak dari normalisasi antara lain: Pertama, basis kepentingan normalisasi yang dilakukan oleh negara-negara Muslim Timur Tengah dengan Israel adalah bagaimana mendapatkan kepentingan pada aspek keamanan dan ekonomi, sama sekali bukan pada aspek isu Palestina. Kedua, negara-negara Muslim Timur Tengah yang melakukan normalisasi hanya menjustifikasi isu Palestina dalam memuluskan keputusan-keputusan politik yang diambil. Hal ini terlihat pada UEA ketika akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Pihak UEA mendeklarasikan bahwa keputusan politik membuka hubungan diplomatik dengan Israel demi kepentingan Palestina, namun kenyataan berbeda ketika Israel melancarkan serangan ke masjid Al-Aqsa pada bulan Mei 2021. Pihak UEA bungkam atas peristiwa serangan tersebut. Ketiga, terjadinya normalisasi akan menjadi penghalang bagi negara-negara Muslim Timur Tengah yang sudah berdamai dengan

Israel untuk mengkritisi segala bentuk tindakan ilegal Israel karena hubungan diplomatik yang terjalin berarti ada penghormatan terhadap persoalan domestik. Keempat, suara-suara perjuangan bangsa Palestina akan semakin kabur dan tidak terdengar pasca normalisasi.¹

Manuver politik yang diambil oleh negara-negara Muslim Timur Tengah yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel akan mendelegitimasi perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kembali hak mereka dari penjajahan Israel. Kekhawatiran tersebut terbukti saat Israel melakukan serangan ke Yerusalem pada akhir ramadhan tahun 2021. Presiden *Emirates Policy Center*, Dr. Ebtesam al-Ketbi mengutarakan pendapatnya bahwa konflik yang terjadi saat ini murni konflik antara Israel dan Palestina bukan antara Arab (Mathews, 2021). Sebuah pernyataan yang sangat ironi mengingat persoalan Israel menjajah Palestina adalah persoalan yang dianggap sebagai isu kawasan bahkan salah satu tujuan didirikannya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah mengadvokasi kepentingan Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel. Pernyataan dari Dr. Ebtesam al-Ketbi mengafirmasi bahwa *Abraham Accords* sama sekali tidak berarti apa-apa terhadap perjuangan Palestina.

Dampak lain dari fenomena normalisasi adalah terjadinya polarisasi di antara negara-negara Timur Tengah. Setidaknya dalam dikategorikan dalam tiga poros yaitu poros yang pro AS poros kontra AS dan poros yang kritis terhadap Amerika Serikat. Poros yang pro diwakili oleh Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang masuk dalam koalisi Arab Saudi termasuk negara yang telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yaitu UEA, Yordania, Bahrain, dan Mesir. Kelompok yang kontra direpresentasikan oleh Iran dan negara-negara yang selama ini menentang hegemoni AS di Timur Tengah termasuk Suriah, Irak, dan Hizbullah - Lebanon, sedangkan poros yang kritis adalah negara-negara yang masih berhubungan dengan AS namun lebih kritis terhadap kebijakan AS di Timur Tengah. Turki dan Qatar (Nainggolan, 2019). Namun secara umum bahwa polarisasi yang terjadi di antara negara-negara Timur Tengah tergambar dalam dua kubu yaitu Iran yang merepresentasikan identitas Persia-Syiah dan kubu Arab Saudi yang mewakili identitas Arab-Sunni.

¹ Wawancara dengan Yon Machmudi dilaksanakan secara online melalui media zoom pada tanggal 16 Desember 2021

Polarisasi yang terjadi menempatkan kawasan Timur Tengah dalam arena konflik yang cukup kompleks karena meliputi berbagai dimensi penyebab konflik termasuk identitas, ideologi, maupun kepentingan sektoral. Dinamika politik yang tercipta dari konstruksi sosial karena perbedaan identitas membuat kawasan Timur Tengah tidak mampu mencapai stabilitas untuk kepentingan bersama.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara empiris, faktor yang memengaruhi normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Timur Tengah dengan Israel disebabkan karena kepentingan nasional dan berbagai bidang antara lain kepentingan ekonomi, politik, dan militer, namun pada dasarnya ketika menggunakan perspektif konstruktivisme, faktor yang sangat signifikan pada prakondisi terjadinya proses normalisasi adalah intersubjektif yang terjalin antara pada pihak yang berkepentingan dalam hal ini AS, Israel, Arab Saudi dan empat negara Timur Tengah yang terlibat dalam normalisasi.

Intersubjektivitas yang terjadi menghasilkan ide dan kesepakatan bersama bahwa Iran merupakan ancaman bagi stabilitas kawasan Timur Tengah sehingga perlu untuk memperkuat kerja sama antara negara-negara tersebut untuk mendelegitimasi pengaruh Iran pada geopolitik kawasan Timur Tengah. Persepsi tersebut diafirmasi dengan kecaman dari pihak Iran yang menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel merupakan tindakan mengkhianati perjuangan panjang bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan mereka dari penjajahan Israel.

Selanjutnya implikasi dari fenomena normalisasi tentunya akan membuat posisi Palestina semakin tidak diuntungkan. Minimal ada lima yang yang merupakan dampak langsung normalisasi terhadap bangsa Palestina, yaitu negara-negara Timur Tengah yang sudah melakukan normalisasi dengan Israel seakan mendemonstrasikan bahwa normalisasi yang terjadi karena keinginan rakyatnya. Normalisasi membuat negara-negara Timur Tengah semakin permisif terhadap Israel. Isu Palestina sudah tidak lagi menjadi prioritas utama bagi negara-negara Muslim Timur Tengah dan hanya dijadikan sebagai isu untuk kepentingan sektoral. Normalisasi juga akan berdampak secara psikologis terhadap negara-negara Muslim Timur Tengah lainnya untuk melakukan

keputusan yang sama, dan normalisasi akan mengaburkan pandangan generasi masa depan bangsa Arab.

Daftar Pustaka

- Adler, E. (2013). Constructivism in international relations: Sources, contributions, and debates. *Handbook of International Relations*, 2, 112–144.
- Aminuddin, C. (2018). *Arab Saudi dan Maroko Kerja Sama Hadapi Ancaman Iran*. Tempo.Co. <https://dunia.tempo.co/read/1085848/arab-saudi-dan-maroko-kerja-sama-hadapi-ancaman-iran/full&view=ok>
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 14.
- Barany, Z. (2013). *Revolt and Resilience in the Arab Kingdoms*. 43(2).
- Bassist, R. (2021). *Israel, Sudan discuss next steps for normalization*. Al-Monitor.Com. <https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/israel-sudan-discuss-next-steps-normalization>
- Burchill, S., & Linklater, A. (2019). *Teori-teori Hubungan Internasional*. Nusamedia.
- Chubin, S. (2012). Iran and the Arab Spring: Ascendancy Frustrated. *GRC Gulf Papers*, 21–27.
- cnnindonesia.com. (2019). *Didemo Besar-besaran, Presiden Sudan Mundur*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190411184931-127-385493/didemo-besar-besaran-presiden-sudan-mundur>
- cnnindonesia. (2020). *Maroko Sepakat Normalisasi Hubungan dengan Israel*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201211075616-127-580773/maroko-sepakat-normalisasi-hubungan-dengan-israel>
- Cohen, G. (2017). *Israeli Air Force Holds Joint Exercise With United Arab Emirates, U.S. and Italy*. Haaretz.Com. <https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-air-force-holds-joint-exercise-with-united-arab-emirates-1.5454004>
- Dazi-Héni, F. (2020). The Gulf States and Israel after the Abraham Accords. *Arab Reform Initiative*.
- Firmansyah, T. (2016). *Ini Peta Populasi Syiah di Timur Tengah*. Republika.Co.Id. <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/01/06/o0jv1377-ini-peta-populasi-syiah-di-timur-tengah-part7>
- Gause, F. G. (2014). Beyond sectarianism: The new Middle East cold war. *Brookings Doha Center Analysis Paper*, 11, 1–27.
- Griffiths, M. R., & O’Callaghan, T. (2014). *International relations: The key concepts*. Routledge.
- Harb, I. K. (2020). *The Middle East Accords: An Arab Perspective*. Americandiplomacy.Web.Unc.Edu. <https://americandiplomacy.web.unc.edu/2020/11/the-middle-east-accords-an-arab-perspective/>
- Harkov, L. (2020). *UAE minister: Our treaty with Israel references a Palestinian state*. Jpost.Com. <https://www.jpost.com/middle-east/uae-fm-scope-of-normalization-with-israel-tied-to-palestinian-statehood-642366>
- Harris, R. A. (1999). *US Terrorism policy towards Sudan: blinded by Islamic*

- Fundamentalism?* Monterey, California: Naval Postgraduate School.
- Hinnebusch, R. (2003). *The international politics of the Middle East*. Manchester University Press.
- Hussain, R. & Abbas, S. Q. (2020). The Question of National Interest in Iran's Foreign Policy: A Constructivist Perspective. *Noor e Marfat*, 11.
- Ibrahim, A. (2021). 7 Bahaya Paling Menonjol dari Gelombang Baru normalisasi dengan Israel. Palinfo.Com. <https://melayu.palinfo.com/articles/2021/1/6/7-Bahaya-Paling-Menonjol-dari-Gelombang-Baru-Normalisasi-dengan-Israel>
- Jalalpoor, S., & Sharfi, H. (2016). The Role of Iran and America's Middle East Policy in Peace Process of Middle East 2001-2016. *Journal of History Culture and Art Research*, 5(4), 113–130.
- Kayaoglu, T. (2015). *The organization of islamic cooperation: Politics, problems, and potential*. Routledge.
- Krasna, J. (2021). *Understanding the Wave of Normalization in the Middle East*. Fpri.Org. <https://www.fpri.org/article/2021/01/understanding-the-wave-of-normalization-in-the-middle-east/>
- Maarif, A. S. (2018). *Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam*. Bentang Bunyan.
- Mabon, S. (2016). *Saudi Arabia and Iran : power rivalry in the Middle East*.
- Machmudi, Y. (2021). *Timur Tengah dalam Sorotan, Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia* (M. R. Rumra (ed.); 1st ed.). PT. Bumi Aksara.
- Mathews, S. (2021). *Despite Gaza bloodshed, few see Abraham Accords derailing*. Aljazeera.Com. <https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/21/despite-gaza-bloodshed-few-see-abraham-accords-derailing>
- McCourt, D. M. (2022). *The new constructivism in international relations theory*. Policy Press.
- Mervin, S., Brunner, R., Legrain, J.-F., Alagha, J., Visser, R., Pierret, T., Meijer, R., Wagemakers, J., Dudoignon, S. A., & Sabahi, F. (2013). *The dynamics of Sunni-Shia relationships: doctrine, transnationalism, intellectuals and the media*. Hurst Publishers.
- Nainggolan, P. P. (2019). *Proxy War di Timur Tengah* (1 (ed.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nawaz, R. (2022). *Iran: A Common Enemy of Israel and the Arab Countries*. Paradigmshift.Com.Pk. <https://www.paradigmshift.com.pk/israel-and-arab-countries/>
- Nor, M. R. M., & Zakaria, N. D. (2009). Perancangan Zionis ke Arah Pembentukan Negara Israel. *Jurnal Usuluddin*, 30, 227–250.
- Podeh, E. (2022). The Many Faces of Normalization: Models of Arab-Israeli Relations. *Strategic Assessment*, 25(1), 55–78.
- Pramono, S., & Purwono, A. (2010). Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik. *Spektrum*, 7(2), 15–21. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/485>
- Priandaru, D. L. (2020). *Damai dengan Maroko, Israel Kirim Delegasi Perdana ke Rabat*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/23/061643970/damai-dengan-maroko-israel-kirim-delegasi-perdana-ke-rabat?page=all>
- Rahman, M. A. (2020). *Arab Saudi Berada di Balik Hubungan Resmi Bahrain-Israel*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/09/15/arab-saudi-berada-di-balik-hubungan-resmi-bahrain-israel/>

- Rahman, M. A. (2020). *Trio Tokoh Yahudi di Balik Layar Hubungan Israel-Maroko*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/12/15/trio-tokoh-yahudi-di-balik-layar-hubungan-israel-maroko>
- Rahman, M. A. (2021). *Masa Depan Sudan Pascakudeta Militer*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/10/29/masa-depan-sudan-pascakudeta-militer>
- Rimapradesi, Y., & Sahide, A. (2021). Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 4(1).
- Rynhold, J., & Yaari, M. (2019). *The quiet revolution in Saudi-Israeli relations The quiet revolution in Saudi-Israeli relations*. 9395. <https://doi.org/10.1080/13629395.2019.1699267>
- Shabaneh, G. (2015). *Operation Decisive Storm: Objectives and Hurdles*. Studies.Aljazeera.Net. <https://studies.aljazeera.net/ar/node/1403>
- Sicca, S. P. (2020). *AS Jual Senjata Rp 14 Triliun kepada Maroko Sehari Setelah Normalisasi dengan Israel*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/13/075816970/as-jual-senjata-rp-14-triliun-kepada-maroko-sehari-setelah-normalisasi>
- Sorkin, E. (2021). *The Abraham Accords: the culmination of a decades-long normalization process between Israel and the UAE*. Boston University.
- State.gov. (2020). *U.S. Relations With Bahrain*. State.Gov. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-bahrain/>
- Tahmi, A. R., Rosyidin, M., & Faiza, M. (2022). Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungan dengan Israel. *Journal of International Relations*, 8(3), 325–333.
- Tamburaka, A. (2011). *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*. Narasi.
- Theys, S. (2017). Constructivism. *International Relations Theory*.
- Waltz, K. N. (2000). Structural realism after the Cold War. *International Security*, 25(1), 5–41.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>
- Wendt, A. (1995). Constructing international politics. *International Security*, 20(1), 71–81.
- Wendt, A. (2000). Social theory of international politics. *Choice Reviews Online*, 37(10), 37-5935-37-5935. <https://doi.org/10.5860/choice.37-5935>
- Wicaksana, A. (2015). *Strategi Arab Saudi terhadap Stabilitas Pemerintahannya Tahun 2011-2013*. Riau University.
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2020). Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina. *ICMES*, 4(3), 171–194.
- Xu, Z., Zhang, B., Yuan, Y., & Li, P. (2021). Explaining Saudi Arabia-Israel Détente: Balance-of-Threat and Constructivism. *2021 International Conference on Public Relations and Social Sciences (ICPRSS 2021)*, 280–286.
- Zweiri, M. (2020). *The UAE-Israel Normalisation 'If you can't convince them, confuse them'*.